

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Andi Reski Apriani (2022) dalam skripsinya yang berjudul **“Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar”** Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Benteng dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Benteng belum berjalan efektif, karena masih terdapat kendala dalam pencapaian target nasional penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2021. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti prosedur pelaksanaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta komunikasi lintas organisasi telah berjalan cukup baik. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) yang menilai efektivitas berdasarkan tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pencapaian tujuan belum sepenuhnya tercapai, integrasi antar pihak pelaksana sudah cukup baik, sedangkan adaptasi dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana masih terbatas. Penelitian ini memberikan

kontribusi penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah.

2. Indri Apriani Nur (2023) dalam skripsinya yang berjudul **“Efektivitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar”** Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembuatan KTP Digital berbasis aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta validasi data dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi IKD di Kota Makassar sudah berjalan efektif, terlihat dari peningkatan signifikan jumlah pengguna sejak awal penerapan pada tahun 2021 sebanyak 420 jiwa, meningkat menjadi 15.000 jiwa pada pertengahan tahun 2023, dan mencapai 50.000 jiwa pada akhir tahun 2023. Program ini mempermudah masyarakat karena proses pembuatan KTP Digital dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi yang tersedia di *Playstore*, tanpa perlu antri di kantor Disdukcapil. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi dan minimnya sosialisasi dari pihak Dinas, sehingga belum semua warga mengetahui cara menggunakan aplikasi IKD.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban (Anggrayni & Yusliati, 2018:13).

Menurut Sawir (2020:125), konsep efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Dalam Hidayat dkk (2024:8) mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan suatu tindakan, kegiatan atau proses. Ini mengacu pada sejauh mana suatu upaya atau usaha mencapai hasil yang diharapkan atau ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mahmudi dalam Hertati (2020:22) “Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.”

Menurut Handoko dalam Mutiarin dan Zaenudin (2021:96) “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Menurut Supriyono dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:40-41) “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”

Menurut Komaruddin dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014:96) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Menurut Mardiasmo dalam Siregar, dkk, (2023:18) “Efektivitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa berhasil atau tidak suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, organisasi tersebut dianggap berjalan dengan efektif. Mengevaluasi seberapa baik hubungan antara target penerimaan pajak dan hasil pungutan pajak itu sendiri dikenal dengan efektivitas.”

Menurut Mahmudi dalam Siahaan dan Pardede (2022:90), “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.”

Menurut Hidayat dalam Angrayni dan Yusliati (2018:13) “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.”

Menurut Harbani Pasolong dalam Zohriah (2023:90) “Efektivitas berasal dari kata efek dan menggunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas memiliki arti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tecapai sesuai dengan yang

diharapkan atau dengan kata lain sasaran tercapai dengan adanya proses kegiatan tersebut.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Sedangkan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

b. Teori Efektivitas

Menurut Campbell J.P dalam Sawir (2020:127) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1) Keberhasilan Program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

3) Kepuasan Terhadap Program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal pemerintah.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey yang dikutip Sudarwan Danim dalam Mudiana, dkk (2024:15) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Menurut Budiani dalam Farhani dan Adnan (2021:71-73)

Efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

- 1) Ketepatan Sasaran Program
Merupakan ukuran efektivitas dengan melihat apakah program sudah sesuai tujuan dan tepat ditujukan kepada pihak yang menjadi sasaran utama.
- 2) Sosialisasi Program
Adalah proses penyampaian informasi agar masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat memanfaatkan program.
- 3) Tujuan Program
Merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai suatu program agar pelaksanaannya terukur dan sesuai misi yang ditetapkan.
- 4) Pemantauan Program
Adalah upaya memeriksa dan mengevaluasi jalannya program untuk memastikan sesuai tujuan serta memperbaiki jika terjadi kendala.

Menurut pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Mudiana, dkk (2024:17-18) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian - bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (b) sasaran merupakan target yang kongkrit, (c) dasar hukum.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) prosedur (b) proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan - perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) peningkatan kemampuan, dan (b) sarana dan prasarana.

c. Kriteria Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya merupakan salah satu kriteria penting dalam ilmu administrasi yang menekankan pada ketepatan antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Efektivitas tidak hanya diukur dari minimnya kesalahan, tetapi juga dari kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, memanfaatkan pengalaman masa lalu, serta mengimplementasikan pemikiran rasional ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, efektivitas menjadi landasan utama bagi individu, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan

secara optimal, serta selalu berkaitan erat dengan rasionalitas dan efisiensi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kriteria efektivitas menurut Makmur (2015:7-9) yang terdiri dari beberapa unsur-unsurnya antara lain:

1) Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Janganlah kita menyalahgunakan waktu karena apabila kita tidak menggunakan dengan tepat berarti kita akan mengalami kerugian karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali dan pergi selamanya.

2) Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3) Ketepatan dalam pengukuran

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektifitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektifan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah

suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur, atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5) Ketepatan berpikir

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6) Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8) Ketepatan ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Adapun menurut Gibson dalam Mutiarin & Zaenudin

(2014:16) bahwa kriteria efektivitas, yaitu :

- 1) Kriteria jangka pendek-produktivitas
- 2) Mutu
- 3) Efisiensi
- 4) Fleksibilitas dan kepuasan
- 5) Pengembangan
- 6) Kriteria jangka menengah-persaingan
- 7) Kriteria jangka panjang-kelangsungan hidup

Kriteria efektifitas suatu program dikatakan efektif atau tidak dapat dilihat pada ukuran pencapaian tujuan. S.P. Siagian dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:19-20) mengemukakan pendapatnya mengenai kriteria efektifitas, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan terhadap apa yang akan dicapai
Kejelasan tujuan ini dimaksudkan supaya tenaga manusia yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
Kejelasan strategi pencapaian tujuan melihat "pada jalan" yang diikuti para pelaksana agar tidak tersesat sebagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
Proses yang dimaksud ini berkorelasi dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang
Pada hakekatnya berarti memutuskan saat ini apa yang dikerjakan organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat
Penyusunan program yang tepat sesuai rencana harus dijabarkan dengan cermat pelaksanaannya sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
Indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
Pelaksanaan program akan mencapai atau tidaknya efektif dan efisien, harus dibarengi dengan pencapaian sasarannya terukur.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian harus memiliki sifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna.

d. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas. Untuk memahami konsep efektivitas lebih detail dan terarah, para ilmuwan mengemukakan berbagai macam bentuk pendekatan dalam efektivitas.

Pendekatan efektivitas suatu program menurut Dedi Amrizal, dkk (2018:44-46) menjelaskan beberapa pendekatan yang digunakan dalam efektivitas yaitu:

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya

dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Martani dan Lubis dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:21) memberikan pandangannya yaitu ada tiga pendekatan kriteria yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, yakni:

1) Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber dengan meng-ukur efektivitas dari *input*. Fokus pendekatan sumber adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Pendekatan proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses menekankan pada melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal organisasi.

3) Pendekatan sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran (*goals approach*) memusatkan perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi mencapai hasil (*output*) sesuai dengan rencana.

Ali Muhidin dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:22-24) menjelaskan beberapa pendekatan efektivitas sebagai bahan evaluasi yaitu:

1) Pendekatan eksperimental (*Experimental Approach*)

Pendekatan eksperimen ini berasal dari kontrol eksperimen yang umumnya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya secara umum memperoleh kesimpulan tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

2) Pendekatan berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*)

Pendekatan dengan orientasi pada tujuan memakai tujuan program itu sendiri sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini dipandang sangat wajar dan praktis dalam sebuah desain pengembangan program. Pendekatan dengan orientasi pada tujuan (*goal oriented approach*) memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

3) Pendekatan berfokus pada keputusan (*The Decision Focused Approach*)

Pendekatan berfokus pada keputusan memberi penekanan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Pandangan ini melihat pentingnya informasi dalam membantu para pengelola program. Hasil dari evaluasi ini mensyaratkan kekuatan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

4) Pendekatan berorientasi pada pemakai (*The User Oriented Approach*)

Pendekatan berorientasi pada pemakai memfokuskan pada masalah penggunaan evaluasi dan memberi penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utama pendekatan berorientasi pada pemakai terletak pada pemakaian informasi secara potensial. Sejumlah elemen cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi sudah sejak dini disadari oleh para evaluator, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan berorientasi pada pemakai, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi penting artinya, namun tidak sepenting cara pemakaian informasi.

5) Pendekatan responsif (*The Responsive Approach*)

Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi memberi penekanan pada mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator umumnya akan menghindari hanya satu jawaban yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik dalam mengevaluasi program. Evaluator mencari cara untuk menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan pandangan orang-orang dalam melukiskan atau menguraikan kenyataan. Jadi, dapat dipahami tujuan evaluasi

adalah memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

2. Identitas Kependudukan Digital

a. Pengertian Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Menurut Pasal 1 ayat 18 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Dengan definisi ini, Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dipahami sebagai wujud digital dari KTP elektronik (KTP-el) beserta dokumen kependudukan lainnya (misalnya kartu keluarga, biodata, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan) yang dapat diakses secara resmi melalui aplikasi di telepon pintar (*smartphone*).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya sekadar pengganti KTP-el fisik, tetapi juga menjadi platform digital identitas

penduduk yang terintegrasi dengan sistem SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

b. Manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki sejumlah manfaat penting, di antaranya:

1) Mengikuti perkembangan teknologi informasi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan digitalisasi kependudukan di era transformasi digital. Dengan adanya IKD, layanan kependudukan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global dan mendukung penerapan *e-government* di Indonesia.

2) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan

Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan secara lebih mudah. Misalnya, data keluarga, biodata, dan akta lahir dapat dilihat dalam satu aplikasi, sehingga meminimalisir kebutuhan membawa banyak dokumen fisik.

3) Mempermudah dan mempercepat pelayanan publik maupun privat

Identitas Kependudukan Digital (IKD) memungkinkan integrasi dengan berbagai layanan, baik pemerintah maupun swasta, seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain. Hal ini mempercepat proses verifikasi identitas tanpa harus menunggu pengecekan manual dokumen fisik.

4) Meningkatkan keamanan data penduduk

Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan sistem autentikasi berlapis berupa biometrik, kode verifikasi, dan *QR Code* terenkripsi. Dengan demikian, kemungkinan pemalsuan identitas atau kebocoran data dapat diminimalisir.

c. Fungsi utama Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) berfungsi dalam tiga aspek penting:

- 1) Pembuktian Identitas, memastikan identitas seseorang secara sah.
- 2) Autentikasi Identitas, melalui verifikasi biometrik, swafoto, sidik jari, atau iris mata.
- 3) Otorisasi Identitas, memberi kendali kepada pemilik Identitas Kependudukan Digital (IKD) atas data pribadinya agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

d. Urgensi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

1) Modernisasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022 menggantikan aturan lama (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 38 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2011) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan era digital. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui sistem kependudukan agar sejalan dengan perkembangan zaman.

2) Efisiensi dan Aksesibilitas

Dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), penduduk tidak lagi perlu membawa KTP-el fisik ke mana-mana. Identitas resmi dapat ditunjukkan langsung melalui aplikasi di gawai pintar. Hal ini sangat bermanfaat terutama dalam situasi darurat, perjalanan, maupun transaksi digital.

3) Perlindungan Data Pribadi

Urgensi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga terletak pada aspek keamanan informasi. Peraturan Menteri Luar Negeri ini menegaskan bahwa sistem keamanan IKD mengacu pada standar internasional seperti ISO/IEC dan NIST. Selain itu, tersedia mekanisme pemblokiran akun jika perangkat hilang serta menu lepas perangkat saat pengguna mengganti ponsel.

4) Dukungan Transformasi Layanan Publik dan Swasta

Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendukung integrasi layanan lintas sektor. Misalnya:

- a) Layanan publik berupa pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, transportasi.
- b) Layanan privat berupa pembukaan rekening bank, klaim asuransi, hingga transaksi digital. Integrasi ini mempercepat pelayanan dan menekan biaya administrasi.

5) Kesiapan Menghadapi Revolusi Digital Nasional

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari strategi besar Transformasi Digital Nasional yang

dicanangkan pemerintah. Dengan adanya IKD, Indonesia semakin siap menuju masyarakat digital yang modern, inklusif, dan efisien dalam layanan publik.

6) Efisiensi Anggaran Negara

Dalam jangka panjang, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengurangi ketergantungan pada blangko KTP-el fisik yang memerlukan biaya cetak, distribusi, dan pemeliharaan.

e. Persyaratan dan Tahapan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

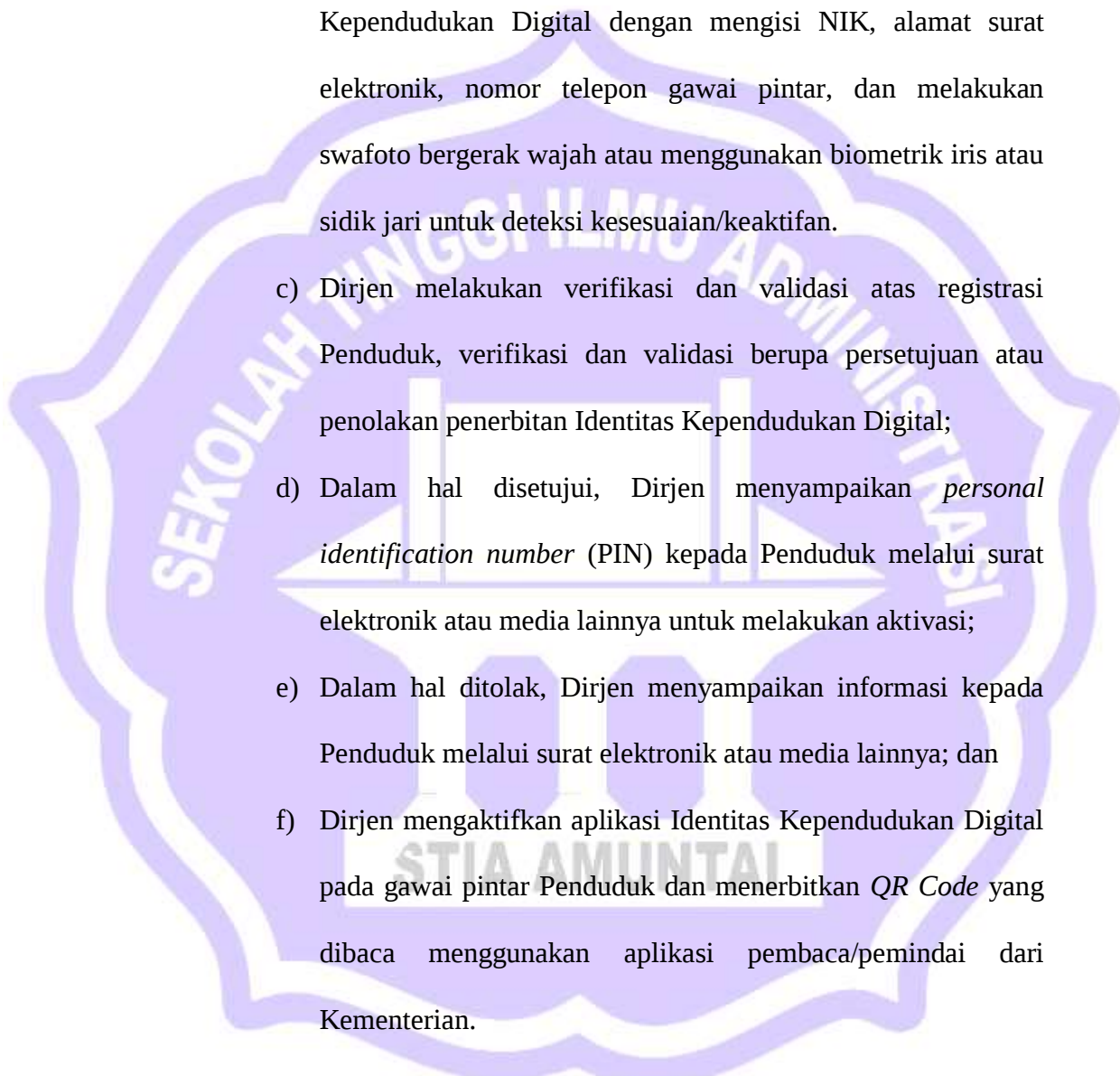
1) Syarat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki beberapa persyaratan dalam penerbitan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, di antaranya:

- a) Memiliki KTP-el fisik atau sudah melakukan perekaman biometrik.
- b) Memiliki gawai pintar atau *smartphone*.
- c) Pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kesiapan SIAK Terpusat.

2) Tahapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki tahapan dalam aktivasinya, yaitu :

- 
- a) Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar;
 - b) Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar, dan melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometrik iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan.
 - c) Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk, verifikasi dan validasi berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital;
 - d) Dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan *personal identification number* (PIN) kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi;
 - e) Dalam hal ditolak, Dirjen menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya; dan
 - f) Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan *QR Code* yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca/pemindai dari Kementerian.

C. Kerangka Pemikiran

Efektivitas adalah sejauh mana perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas pada dasarnya merupakan salah satu kriteria penting

dalam ilmu administrasi yang menekankan pada ketepatan antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Efektivitas tidak hanya diukur dari minimnya kesalahan, tetapi juga dari kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, memanfaatkan pengalaman masa lalu, serta mengimplementasikan pemikiran rasional ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, efektivitas menjadi landasan utama bagi individu, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan secara optimal, serta selalu berkaitan erat dengan rasionalitas dan efisiensi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu agenda penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Transformasi pelayanan publik menuju era digital memiliki relevansi yang krusial dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bentuk modernisasi administrasi kependudukan yang merepresentasikan KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya dalam bentuk digital melalui aplikasi pada gawai pintar. IKD bertujuan mempermudah akses layanan publik, meningkatkan keamanan data penduduk dengan sistem autentikasi berlapis, serta mendukung integrasi layanan lintas sektor. Urgensi IKD terletak pada perannya dalam memperkuat transformasi digital nasional, meningkatkan efisiensi pelayanan, melindungi data pribadi, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Dengan adanya IKD, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sesuai dengan teori Penelitian dengan teori Campbell J.P dalam Sawir (2020:127). Teori ini mencakup beberapa indikator terkait efektivitas yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh



Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

